

SKRIPSI

OPSI PILIHAN KESANGGUPAN MEMBAYAR UANG PENGGANTI BAGI TERPIDANA MEMPERSULIT PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA



NAMA : M.DEVAN FADILLAH

NIM : 1710611175

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
VETERAN JAKARTA**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

OPSI PILIHAN KESANGGUPAN MEMBAYAR UANG PENGGANTI BAGI
TERDAKWA MEMPERSULIT PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA

MUHAMAD DEVAN FADILLAH
1710611175

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1 - Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 20 Oktober 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqqurahman, S.H., M.Kn.

NIP 198701022019031006

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.

NIK 216121211



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi Hukum diajukan oleh :

Nama : Muhamad Devan Fadillah
NPM : 1710611175
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum
Judul : Opsi Pilihan Kesanggupan Membayar Uang Pengganti bagi terpidana mempersulit pengembalian kerugian keuangan negara

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dr. Beniharnoni Harefa, S.H., LL.M.

Ketua

Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H.

Anggota 1

Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.

Anggota 2



Dr. Abdul Halim, M. Ag

Dekan

Taupiqdurrahman, S.H., M. Kn

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : November 2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut dengan hukum yang berlaku.

N A M A : Muhamad Devan Fadillah

N.I.M : 1710611175

Tanggal : 10 November 2022

Tanda Tangan :



Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Devan Fadillah

NIM/NPM : 1710611175

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : **Opsi pilihan kesanggupan membayar uang pengganti bagi terdakwa mempersulit Pengembalian kerugian keuangan negara.**

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty Rights).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 10 November 2022

Yang menyatakan,



Muhamad Devan Fadillah

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi tidak lepas dari Pidana Uang Pengganti yang merupakan bagian daripada pidana tambahan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Uang pengganti Dalam tindak pidana korupsi sering sekali tidak sesuai dengan besaran kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi itu sendiri dikarenakan banyaknya cara yang dilakukan oleh terdakwa untuk menutupi harta hasil daripada korupsinya itu. dalam skripsi ini akan membahas aturan hukum apabila terpidana menyatakan ketidakmampuannya membayar uang pengganti karena banyak dari mereka lebih memilih pidana subsidernya yaitu pidana pengganti yaitu pidana penjara yang dimana aturan tentang uang pengganti hanya dimuat dalam pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dengan pengaturan hanya berpatokan pada “pengembalian uang yang sebesar-besarnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana” kemudian dalam RUU Perampasan aset hadir dengan mekanisme NCB(*Non Conviction Based*) Asset Forfeiture yang memuat perampasan aset tanpa pemidanaan yang dimuat dalam UU No 7 Tahun 2006 tentang pengesahan terhadap undang-undang *United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Uncac)* yang dimuat dalam pasal 54 yaitu negara harus dapat melakukan “Tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyelamatkan aset dengan sistem perampasan aset tanpa pemidanaan”. penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data berupa Sumber Hukum primer, Skunder, dan tersier. Pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan, dan Teknik analisisnya deskriptif analitis. Untuk tinjauan teorinya menggunakan Teori Gabungan dan Teori *Dettrence Effect*. Hasil penelitian setelah dilakukan analisis terhadap beberapa pasal dalam undang-undang dan rancangan undang-undang sehingga didapat aturan yang tepat untuk menjerat terdakwa dalam tindak pidana korupsi khususnya uang pengganti, dan penerapan RUU Perampasan aset dalam tindak pidana korupsi dianggap efektif untuk menanggulangi kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : **Korupsi, Pidana Uang Pengganti, NCB(*Non Conviction Based*)**

Abstract

The Corruption Crime is inseparable from the Compensation Money Crime which is part of an additional crime to recover state financial losses. Compensation money In corruption crimes it is often not in accordance with the amount of state financial losses caused by corruption itself due to the many ways that are used by defendants to cover up the proceeds from their corruption. In this thesis, we will discuss the rule of law if the defendant declares his inability to pay replacement money because many of them prefer the subsidiary punishment, namely imprisonment, where the rules regarding replacement money are only contained in Article 18 with the setting based only on “ The maximum refund of the same amount as the property obtained from the crime” then in the Asset Confiscation it comes with the NCB (Non Conviction Based) Asset Forfeiture mechanism which contains asset confiscation without punishment contained in Law No. 7 of 2006 concerning ratification of laws Uncac which is contained in article 54 namely the state must be able to take the necessary actions to save assets with an asset confiscation system without punishment. For a theoretical review using the Combined Theory and Dettrence Effect Theory. The results of the research after an analysis of several articles in the law and the draft law so that the right rules are obtained to ensnare the accused in corruption, especially replacement money, and the implementation of the Asset Confiscation Bill in corruption crimes is considered effective in overcoming state financial losses due to corruption crimes.

Keyword : ***Corruption, substitute money, state finances***

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang yang pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “Opsi Pilihan Kesanggupan Membayar Uang Pengganti Bagi Terpidana Mempersulit Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”.

Skripsi ini pada dasarnya saya buat untuk memenuhi kriteria kelulusan fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jakarta. Saya harus kuasai pembuatan skripsi ini membutuhkan usaha dan kerja keras. Berbagai tantangan saya hadapi dalam proses pembuatan skripsi ini. Namun, saya memiliki banyak orang-orang yang terus mendukung dan mendorong saya untuk terus majusampai akhirnya saya menyelesaikan skripsi ini.

Terima Kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada:

1. Dr. Anter Venus, MA, Comm., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Dr. H. Abdul Halim, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Dian Khoreanita Pratiwi, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. H.Heru Suyanto, S.H., M.H., C.L.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
6. Dr.Handoyo Prasetyo, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan saran serta dukungan yang bermanfaat dalam skripsi ini.
7. Taupiqurrahman, S.H.,M.KN. selaku selaku Kepala Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
8. Bapak & Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, dalam memberikan ilmu kepada penulis.
9. Kepada ibu saya Desi Elliyana yang sudah memberikan dukungan dan selalu memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini

Serta kepada orang-orang di fakultas hukum UPNVJ yang tidak dapat saya sebut satu-satu yang telah banyak membantu saya dalam proses pembentukan tugas akhir saya.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada adik-adik saya yang selalu ada untuk mendukung, mendoakan, dan memberi dorongan kepada saya dan teman-teman saya di mana pun mereka berada yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu yang juga turut mendukung dan membantu saya.

Akhir kata, saya menyadari bahwa saya adalah manusia yang jauh dari kata sempurna. Saya meminta maaf jikalau masih banyak kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Skripsi ini saya tuju sebagai salah satu rasa syukur terhadap Allah SWT dan saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca

Depok, 25 Oktober 2022

Muhamad Devan Fadillah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
Latar belakang	1
Rumusan masalah	8
Ruang lingkup	8
Tujuan penelitian dan manfaat penelitian.....	8
Metode penelitian.....	9
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Literature review	12
B. Tinjauan Teori	14
BAB III	18
DESKRIPSI HASIL TEMUAN	18
1. Pengertian Korupsi	18
2. Pentingnya pengaturan pidana tambahan terutama uang pengganti dalam tindak pidana korupsi	19
3. Upaya peroleha uang pengganti melalui instrument pidana	20
4. Upaya jaksa dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan negara	21
BAB IV	23
PEMBAHASAN	23
A. Bagaimana pengaturan penerapan uang pengganti dalam hal terpidana menyatakan ketidaksanggupannya membayar uang pengganti berdasarkan UU tindak pidana korupsi	23
B. Bagaimana pengaturan terbaik dalam pengoptimalkan penagihan pidana uang pengganti guna mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi	34
BAB V	52
PENUTUP	52

A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
Daftar Pustaka	54